

11

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

## INVESTASI US\$ 30 M Pertamina Diminta Kelola Blok Natuna

Oleh **Novy Lumanauw**  
dan **Happy Amanda**

JAKARTA – Pertamina diminta mengelola lapangan gas alam Blok Natuna D-Alpha di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menyusul terjadinya *deadlock* dalam rangkaian negosiasi antara pemerintah dan ExxonMobil. Untuk mengelola lapangan gas itu dibutuhkan investasi sekitar US\$ 30 miliar.

“Setelah Exxon diberi waktu satu hingga dua tahun dan negosiasi tidak ketemu, Presiden meminta Pertamina untuk bersiap diri,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Purnomo, delapan isu yang masih dipersengkatakan antara pemerintah dan ExxonMobil sulit dicarikan jalan keluar karena tiga isu di antaranya menyangkut undang-undang. “Kalau sudah menyangkut undang-undang, sulit untuk dilangkahi,” ujarnya.

Purnomo menyebutkan delapan isu yang masih menjadi sengketa di antaranya soal pa-

jak, periode kontrak, jaminan pemerintah, dan pembagian hasil. “Pemerintah akan segera menyurati ExxonMobil terkait keputusan ini, bahwa delapan *pending issue* itu sulit dicari titik temunya,” tuturnya.

Selain itu, kata Purnomo, akan dibentuk tim yang akan membahas berbagai permasalahan makro sebab secara geografis Blok D-Alpha Natuna terletak di wilayah perbatasan.

### Blok Natuna D-Alpha

- Lokasi: 300 km Timur Laut Pulau Natuna
- Cadangan gas 46 TCF
- Kontrak Lama: ExxonMobil kuasai 76% dan Pertamina 24%
- Biaya Investasi US\$ 30 Miliar
- Mitra yang siap bekerja sama dengan Pertamina: ExxonMobil, Shell, Star Oil, dan Total Indonesia

Sumber: Departemen ESDM

“Tim Pemerintah akan merumuskan langkah-langkah ke depan yang sifatnya bukan korporasi, tingkat yang lebih makro, termasuk dalamnya pengembangan daerah perbatasan. Urusan korporasi diserahkan ke Pertamina,” kata dia.

Pemerintah mengharapkan Pertamina dapat memanfaatkan kesempatan berharga yang diberikan sehingga dapat meningkatkan pamornya di pentas global. “Pertamina diberi waktu tiga minggu menyusun studi kelayakan dan rencana kerja untuk dipresentasikan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama,” kata dia.

### Cadangan Tinggi

Menurut Purnomo, Pertamina harus mencari mitra kerja yang kredibel dan mampu dalam pendanaan dan teknologi, sebab gas yang dihasilkan Natuna D-Alpha memiliki kandungan CO2 cukup tinggi, sekitar 70%. Blok Natuna D-Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar, sekitar 46 triliun kaki kubik atau 3-4 kali produksi lapangan Tangguh. Blok Natuna D-Alpha akan menjadi lapangan gas terbesar di dunia. Dan ini menjadi pengalaman pertama bagi Pertamina untuk mengelola gas alam yang terletak di tengah laut, yaitu pada kedalaman antara 300-400 meter.

Ditanya tentang kontrak antara pemerintah dan ExxonMobil, terkait pengelolaan blok tersebut, Purnomo menjelaskan, pemerintah telah memutuskan kontrak dengan ExxonMobil pada 2005 karena hingga 20 tahun tak kunjung berproduksi. “Sampai batas tertentu tidak dilakukan apa-apa, dan sesuai kontrak, itu berarti otomatis *termination*,” ujar Purnomo. Meskipun demikian, ExxonMobil masih memiliki peluang untuk melakukan eksploitasi gas alam di Blok D Alpha Natuna, melalui kemitraan dengan Pertamina.

Dalam kontrak lama, Exxon yang menguasai 76% di blok tersebut, sementara Pertamina 24%. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100%, sedang pemerintah nol%.

Blok Natuna sejak 1980-an dikelola Esso. Saat itu pemerintah masih menikmati hasil eksploitasi blok tersebut. Akan tetapi, sejak 1994, Esso

(kemudian diakuisisi Exxon Mobil) dan Pertamina mengubah kontrak yang menempatkan Exxon sebagai penguasa penuh hasil eksploitasi, sedangkan pusat sekadar kebagian pajak.

#### Sampaikan Proposal

Sementara itu, Dirut Pertamina Ari Soemarno menegaskan, pihaknya segera menyampaikan proposal pengelolaan Blok Natuna D Alpha. "Kami segera siapkan kerangka kerja dan studi kelayakan pengelolaan blok tersebut dalam tiga minggu ini," katanya di Jakarta, Selasa.

Melalui proposal tersebut, lanjutnya, pemerintah akan mendapatkan gambaran persyaratan atau asistensi yang perlu diberikan kepada Pertamina. Proposal tersebut akan dievaluasi tim pengarah yang beranggotakan, antara lain Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri ESDM.

Ari juga mengatakan, pihaknya akan bermitra dengan perusahaan lain, mengingat proyek tersebut membutuhkan permodalan dan teknologi yang tinggi.

"Proyek ini tidak mudah. Tapi, kami akan tetap menjadi *lead* dalam konsorsium,"

katanya.

Menurut Arie, sejumlah perusahaan multinasional telah menyatakan kesiapan mengelola eksploitasi gas alam di Blok D Alpha Natuna bersama dengan Pertamina. "Banyak perusahaan multinasional yang bisa, seperti Exxon-Mobil dan Shell. Star Oil juga menyatakan punya kemampuan, sebab dia sudah biasa eksploitasi gas di laut dalam. Total Indonesia juga mengatakan hal yang sama," katanya.

Calon mitra Pertamina, kata dia, harus memiliki kemampuan di tiga sektor yaitu penguasaan teknologi penghapusan CO2, teknologi penyimpanan CO2 kembali, dan teknologi lepas pantai.

Saat ditanya mengenai perusahaan yang akan dipilih sebagai mitra, Ari mengatakan bahwa hal itu baru akan dicantumkan dalam kajian kesiapan Pertamina tiga pekan mendatang, sebagaimana keputusan hasil rapat terbatas.

Hingga kini terdapat tiga calon pembeli gas dari Blok Natuna D Alpha, yaitu Petro Vietnam, Petronas, dan PTT Thailand. Petronas dan PTT meminta pasokan gas sebanyak 1 miliar kaki kubik (mmbtu) per hari, dengan harga US\$ 16 per mmbtu.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

## Perusahaan Asing Minat Ikut Kelola Natuna

TAHUN 2008

Kamsari  
NERACA

Jakarta - Sejumlah perusahaan asing menyatakan untuk ikut bergabung dengan PT Pertamina untuk mengelola Blok Natuna D Alpha, Kepri yang diperkirakan mengandung cadangan gas cukup besar.

Beberapa perusahaan migas asing yang berminat melakukan kegiatan eksplorasi antara lain ExxonMobil, Shell, Total, StatOil, dan Petrochina. Sementara yang berminat bermain di sektor hilir diantaranya Petronas, PTT Thailand, dan Petro-Vietnam.

"Tapi kami akan pilih yang memberikan keuntungan bagi negara," kata Dirut Pertamina Ari Soemarno di Jakarta, Selasa.

Menurut Ari, minat perusahaan asing itu membuktikan proyek Natuna punya nilai ekonomi tinggi. Meskipun pengembangannya membutuhkan modal besar yang diperkirakan mencapai 52 miliar dolar AS. "Kalau tidak, mana mungkin ExxonMobil terus berniat mengembangkannya," ujarnya.

Apalagi, kata Ari, harga minyak saat ini sekitar 100 dolar AS per barel, sementara harga gas alam cair (LNG) bisa mencapai 13-14 dolar AS per MMBTU.

Ari menyebut, Pertamina segera menyampaikan proposal pengelolaan blok tersebut dalam tiga minggu ke depan. Melalui proposal tersebut, pemerintah akan

mendapatkan gambaran persyaratan atau asistensi yang perlu diberikan kepada Pertamina.

Ari juga mengatakan, pihaknya akan bermitra dengan perusahaan lain mengingat proyek membutuhkan permodalan dan teknologi yang tinggi. "Proyek ini tidak mudah. Tapi, kami akan tetap menjadi *lead* dalam konsorsium," katanya. Ia menjelaskan, teknologi diperlukan selain mengandung CO2 yang tinggi, juga gas karbon tidak boleh dibuang ke udara, sehingga harus diinjeksikan ke dalam tanah kembali. "Selain itu, blok ini berada di laut dengan kedalaman 300 m," katanya.

Ari mengungkapkan, pengembangan blok Natuna akan menjadi lapangan gas terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pembangunan tiap anjungannya saja diperkirakan lebih luas dari lapangan sepakbola. "Dan akan ada 5 atau 6 anjungan yang dibutuhkan," ujarnya.

Anjungan itu merupakan bagian rancangan pembangunan fasilitas pengembangan lapangan gas Natuna yang dikerjakan Pertamina. Sementara itu Menteri ESDM Purnomo Yugianto menyatakan, Pertamina mendapat mandat untuk mengelola Blok Natuna D Alpha. Nilai investasinya mencapai 30 miliar Dolar AS, atau yang terbesar dalam sepanjang sejarah.

Agar investasi itu tidak kacau balau, Presiden SBY meminta agar Pertamina

menyampaikan studi kelayakan secara rinci untuk pengelolaan Blok Natuna dalam 3 pekan ke depan.

Pertamina diminta membuat langkah aksi dari sisi korporasi untuk pengelolaan Blok Natuna itu, setelah hak pengelolaannya diserahkan dari ExxonMobil ke Pertamina.

Purnomo juga mengungkapkan, ada 8 poin yang akhirnya menyebabkan Pemerintah dan Exxon tak mencapai kata sepakat. 8 poin itu tak mungkin ditembus karena terkait dengan UU.

"Tadi melaporkan pada presiden mengenai perkembangan negosiasi Natuna, ada 8 isu pending yang sulit untuk dicapai kesepakatan. Diantaranya masalah peraturan pajak, periode kontrak dan jaminan pemerintah," jelasnya.

Pemerintah telah memutuskan kontrak Natuna D Alpha dengan Exxon pada 2005 karena hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi. Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham kepemilikan dan Pertamina 24 persen.

Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen. Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung CO2.●

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

# Pertamina Diminta Kelola Natuna

## Biaya eksplorasi Blok Natuna mencapai 52 miliar dolar AS.

JAKARTA — Pertamina diminta mempersiapkan diri mengeksplorasi ladang gas alam di Blok D-Alpha Natuna, Kepulauan Riau. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (19/2).

"Setelah ExxonMobil diberi waktu satu hingga dua tahun, dan negosiasi tidak mencapai titik temu, Presiden minta Pertamina bersiap diri," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, usai rapat.

Pertamina diberi waktu tiga minggu menyampaikan kesiapannya ke Presiden. Persiapan Pertamina penting, karena bila ladang Natuna jadi dioperasikan, akan menjadi eksploitasi gas alam terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan nilai investasi lebih dari 30 miliar dolar AS. "Itu pun masih bisa meningkat lagi."

Blok D-Alpha Natuna juga menjadi pengalaman pertama Pertamina mengelola ladang gas

di tengah laut (*offshore*) dalam skala besar. Kandungan karbon-dioksida (CO2) yang cukup tinggi dalam gas alam Natuna, membutuhkan teknologi yang belum dimiliki Pertamina.

"Tiga minggu lagi, Pertamina menyampaikan laporan kesiapan dan uji kelayakan. Pertamina juga akan menyampaikan siapa mitra yang layak," jelasnya.

Rapat yang dihadiri Wapres, tiga menko, Seskab, Mendagri, Meneg BUMN, Dirut Pertamina, dan Kepala BP Migas itu juga memutuskan membentuk tim dari unsur pemerintah. Tim akan mendalami masalah makro pengelolaan Blok D-Alpha Natuna, di antaranya soal perbatasan.

Dirut Pertamina, Ari Sumarno, mengakui blok itu termasuk sulit. Setidaknya tiga tantangan harus diatasi: Penguasaan teknologi penghapusan CO2, teknologi penyimpanan CO2 kembali, teknologi lepas pantai karena lokasi di laut lepas berkedalaman 400 meter.

"Kalau terealisasi, perlu anjungan lepas pantai seluas 5-6 kali lapangan sepak bola. Ini akan menjadi anjungan lepas pantai terbesar di dunia," katanya.

Cadangan gas di blok itu, paparnya, sangat ekonomis untuk

dikembangkan. Dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel, maka harga jual gas Natuna bisa 13-14 dolar AS per *million metric British thermal unit* (MMBTU). "Jadi, masih *feasible* untuk dikembangkan."

Tantangan berikutnya soal pendanaan. "Diperkirakan, biaya proyek eksplorasi Natuna bisa mencapai 52 miliar dolar AS." Mengingat ini, Pertamina bakal menggandeng mitra kerja yang tak hanya mampu dari sisi teknologi, tapi juga finansial.

Sejumlah perusahaan multinasional menyatakan siap menjadi mitra Pertamina. "ExxonMobil bisa, Shell mampu, StatOil juga mampu, Total juga mengatakan hal sama. Kami akan pilih yang menguntungkan bagi negara."

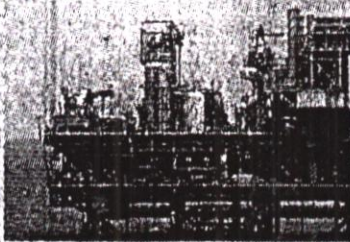
Siapa yang akan dipilih? "Nanti kita lihatlah secara keseluruhan. Kita susun dulu, saya belum bisa bicara sekarang," katanya.

Pengamat migas dari Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Reform Institute, Pury Agung Rakhmanto, meminta pemerintah memperjelas klausul bagi hasil. Dia mengusulkan pola bagi hasil 65 persen untuk pemerintah dan 35 persen untuk Pertamina. ■ wed/dia

## Perjalanan Blok D-Alpha Natuna

- Pemerintah memutuskan kontrak jadang Blok D-Alpha Natuna dengan ExxonMobil sejak akhir 2005, karena sudah 20 tahun, blok tersebut tak juga kunjung diproduksi. ExxonMobil minta kontrak diperpanjang.
- Saat itu, Exxon menyerahkan selembar surat ke pemerintah dan BP Migas. "Itu kita anggap tidak cukup," kata Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. BP Migas meminta Exxon melengkapi uji kelayakan, namun sampai batas waktu tertentu, tak dipenuhi. "Sesuai kontrak, otomatis berakhir."

SONY SOEMARSONO/REPUBLIKA



- Lalu, ada komunikasi lagi antara ExxonMobil dan pemerintah untuk negosiasi dalam kondisi baru. Delapan isu mengganjal negosiasi ulang itu. Tiga isu di antaranya menyangkut UU, yang lain seperti pajak, periode kontrak, jaminan pemerintah, dan bagi hasil.

- Dalam kontrak lama, ExxonMobil menguasai 76 persen saham kepemilikan blok itu, dan Pertamina 24 persen. Namun, bagi hasil kontrak sangat timpang: Exxon 100 persen, Pertamina nol persen.
- Blok D-Alpha Natuna punya cadangan gas hingga 46 triliun kaki kubik, 70 persen gas itu mengandung CO<sub>2</sub>.
- Pertamina akan mengambil alih seluruh proses negosiasi yang sedang berlangsung antara ExxonMobil Oil Indonesia dan para pembeli gas, setelah Pertamina resmi ditunjuk pemerintah sebagai operator Blok D-Alpha Natuna. Tiga perusahaan migas asing berminat membeli gas D-Alpha Natuna: Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan Petro-Vietnam. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008



Investor Daily/ANTARA/Rumgapres/Haryanto/pd/08

### Rapat Terbatas Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Rapat Terbatas Kabinet mengenai negosiasi Blok D Alfa Natuna di daerah Kepri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2). Apabila Blok D Alfa Natuna dioperasikan, maka akan menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, karena nilainya diperkirakan mencapai sekitar US\$ 30 miliar berdasarkan perhitungan saat ini.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 15 <span style="float: right;">TAHUN 2008</span>		

**KAPAL  
TANKER:**

Dirut PT Pertamina, Ari H Soemarno, dan Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Mohammad Firmansyah Arifin (kanan), menandatangani kontrak pembangunan dua unit kapal tanker dengan nilai 29,157 juta dolar AS, di Jakarta, Selasa (19/2).



## Pertamina Pesan Dua Kapal Tanker

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) menandatangani kerja sama pembangunan dua unit kapal tanker minyak tipe 6.500 LTDW (Long Ton Dead Weight) senilai 29,157 juta dolar AS. Pembangunan 2 unit kapal tanker ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset BUMN migas tersebut.

Pembangunan unit pertama kapal tanker ini dijadwalkan selesai pada 31 Maret 2011. Sedangkan unit kedua akan selesai pada 30 September 2011.

Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno mengatakan pembangunan dua kapal tanker ini meru-

upakan upaya untuk meremajakan kapal tanker yang dimiliki Pertamina. Dari 130 kapal tanker yang dioperasikan Pertamina di seluruh Indonesia, menurutnya, 80 persen merupakan kapal *carter* (sewa).

"Dua kapal ini akan memperbaiki posisi tawar Pertamina terhadap kapal *carter*, dan memperkuat jumlah armada kapal milik Pertamina," ujarnya di sela penandatanganan kontrak pembangunan kapal tanker di Jakarta, Selasa (19/2).

Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Firmansyah Arifin, menuturkan dua kapal tanker ini merupakan kapal tanker kelima dan keenam yang dipesan

Pertamina ke BUMN perkapalan ini. Sebelumnya, PT Dok dan dan Perkapalan Surabaya sudah menyelesaikan pesanan empat kapal tanker untuk Pertamina. "Pengalaman di empat tanker sebelumnya akan sangat membantu penyelesaian dua kapal tanker ini tepat waktu," paparnya.

Selain kedua unit kapal ini, Pertamina juga telah memesan pengadaan kapal lagi sebanyak 5 unit kapal tipe 30 ribu LTDW ke galangan kapal Zhejiang Chenghe Shipbuilding Co Ltd yang dalam waktu dekat akan ditandatangani kontraknya. Kapal itu akan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

■ dia

**Dari 130 kapal tanker yang dioperasikan Pertamina di seluruh Indonesia, 80 persen di antaranya merupakan kapal *carter*.**

Ari H Soemarno  
Dirut Pertamina

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLIKA

● SUARA KARYA  
○ SEPUTAR INDONESIA  
○ SUARA PEMBARUAN  
○ SINAR HARAPAN  
○ TABLOID KONTAN  
○ THE JAKARTA POST  
○ MAJALAH GATRA  
○ MAJALAH TEMPO  
○ MAJALAH TRUST  
○

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

## MIGAS

# Pertamina Segera Sampaikan Rencana Pengelolaan Blok Natuna

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina (Persero) segera menyampaikan proposal pengelolaan Blok Natuna D Alpha di Kepulauan Riau yang diperkirakan mengandung cadangan gas cukup besar.

"Kami segera siapkan kerangka kerja dan studi kelayakan pengelolaan blok tersebut dalam tiga minggu ini," kata Dirut Pertamina Ari H Soemarno di Jakarta, Selasa. Melalui proposal tersebut, lanjut dia, pemerintah akan mendapatkan gambaran persyaratan atau asistensi yang perlu diberikan kepada Pertamina.

Proposal tersebut akan dievaluasi tim pengarah yang beranggotakan antara lain Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri ESDM. Ari juga mengatakan, pihaknya akan bermitra dengan perusahaan lain mengingat proyek membutuhkan permodalan dan teknologi yang tinggi. "Proyek ini tidak mudah. Tapi, kami akan tetap menjadi lead dalam konsorsium," katanya.

Ari menjelaskan, teknologi diperlukan selain mengandung CO2 yang tinggi, juga gas karbon tidak boleh di buang ke udara, sehingga harus diinjeksikan ke dalam tanah kembali. "Selain itu, blok ini berada di laut dengan kedalaman 300 m," katanya.

Sejumlah perusahaan yang sudah menyatakan minatnya antara lain ExxonMobil, Shell, Total, StatOil, dan Petrochina di hulu, sedang hilir antara lain Petronas, PTT Thailand, dan PetroVietnam. "Kami akan pilih yang memberikan keuntungan bagi negara," katanya.

Meski demikian, Ari berkeyakinan, meski membutuhkan modal besar yang diperkirakan mencapai 52 miliar dolar AS, proyek Natuna tetap bernilai ekonomis. "Kalau tidak, mana mungkin ExxonMobil terus berniat mengembangkannya," ujarnya.

Ditambahkan, dengan harga minyak sekitar 100 dolar AS per barel, harga gas alam cair (LNG) bisa mencapai 13-14 dolar AS per MMBTU. Pemerintah telah memutuskan kontrak Natuna D Alpha dengan Exxon pada 2005 karena hingga 20 tahun lamanya tak kunjung berproduksi.

Dalam kontrak lama, Exxon menguasai 76 persen saham kepemilikan dan Pertamina 24 persen. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen.

Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung CO2.

Pertamina menilai, pengelolaan Blok Natuna tentunya sangat ekonomis meski membutuhkan pendanaan yang cukup besar, karena selama ini perusahaan yang memegang hal pengelola sebelumnya sempat mempertahankan keinginiannya. (A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

## Polda Metro Amankan BBM Bersubsidi Senilai Rp 1,7 Miliar

JAKARTA – Jajaran Satuan Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan pengoplos dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 242.791 liter atau senilai Rp 1,7 miliar.

Dari 71 tersangka yang diamankan, 30 orang di antaranya merupakan pemilik BBM tersebut. Selebihnya para sopir dan kernet. "Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi Sumdaling yang digelar pada November 2007 hingga Januari 2008. Para tersangka dibekuk di 38 lokasi, kebanyakan di jalan protokol dan tol dalam kota," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus AKBP Tony Hermanto di Jakarta, Selasa (19/2).

Tony menjelaskan, modus operandi yang dijalankan pelaku yakni mengelabui petugas dengan cara menaruh drum di dalam truk. Di tengah perjalanan, saat ditanyai petugas, mereka mengaku bukan BBM namun barang konsum-

si seperti beras. Namun, setelah diperiksa, para pelaku kemudian mengaku hendak membawa BBM bersubsidi untuk di jual ke industri.

Kepala Satuan (Kasat) Sumdaling AKBP Bahagia Daçi menambahkan, total barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka sebanyak 242.791 liter atau setara 242 ton solar siap oplos. Jumlah tersebut memiliki rincian BBM jenis solar 114.451 liter, minyak tanah (minah) 120.340 liter, MDF/residu (minyak tanah hitam) sebanyak 8.000 liter.

Dia menambahkan, harga per liter minah dan solar untuk konsumsi industri sebesar Rp 7.000 hingga 7.500. Jadi, nilai barang bukti BBM yang berhasil diamankan mencapai Rp 1,7 miliar.

Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka akan menjual BBM oplosan ke beberapa industri di wilayah Jakarta. Sedangkan BBM bersubsidi mereka dapatkan dari SPBU, agen, dan pangkalan di daerah Bandung, Jawa Barat,

**Hasil Sitaan BBM Bersubsidi November 2007-Januari 2008**

No.	Jenis	Banyak (liter)
1.	Solar	114.451
2.	Minyak tanah	120.340
3.	Residu/MDF	8.000
<b>Jumlah</b>		<b>242.791</b>

Sumber: Satuan Sumdaling Polda Metro Jaya

maupun Tangerang, Banten.

Selain mengamankan BBM, polisi juga menyita 27 unit mobil *pick up*, tangki, dan truk, sebuah tangki duduk, lima unit mesin alkon (alat pencampur minyak tanah dan solar), serta tiga lembar ST-NK truk. Para pengoplos solar ini adalah pelaku lama.

"Mereka kebingungan karena di Jakarta sudah berjalan konversi minyak tanah ke gas, makanya mereka mencari ke Jawa Barat dan Banten," jelas Bahagia. Mereka akan dijerat dengan UU Migas Pasal 23 Tahun 2001 dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari 38 kasus, 29 kasus sudah P21 (lengkap). (c105)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

## Harga Minyak Dunia Di Atas 96 Dolar AS di Asia

### NERACA

Singapura - Harga minyak dunia naik di atas 96 dolar AS di perdagangan Asia, Selasa, karena meningkatnya kekhawatiran mengenai kemampuan pasokan, kata kalangan dealer.

Pada perdagangan pagi, kontrak utama minyak jenis ringan di New York untuk pengiriman Maret naik 65 sen menjadi 96,15 dolar AS per barel di perdagangan elektronik New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Harga itu sempat menyentuh angka tertinggi perdagangan harian di 96,45 dolar per barel. Sementara harga minyak mentah Laut Utara Brent untuk pengiriman April naik dua sen menjadi 94,93 dolar per barel.

"Tidak ada berita yang memberi dampak pada pasar hari ini, tetapi kekhawatiran mengenai terganggunya pasokan di Nigeria dan Venezuela masih terus mengangkat harga," kata David Moore, analis komoditas Commonwealth Bank of Australia di Sidney.

Penurunan pasokan minyak Venezuela ke perusahaan minyak raksasa AS, ExxonMobil, karena sengketa hukum, masih menjadi kekhawatiran utama terhadap pasokan. Sengketa hukum yang terkait dengan permohonan jaminan kompensasi ExxonMobil setelah pemerintah Venezuela menasionalisasikan ladang minyak utamanya di lembah Orinoco, termasuk dua lapangan operasional ExxonMobil.

ExxonMobil mengatakan telah memenangkan pengadilan di New York, London, Belanda dan "Netherlands Antilles" membekukan sekitar 12 miliar dolar aset perusahaan minyak Venezuela PDVSA di wilayah hukum keempat negara itu.

Di Nigeria, ketidakstabilan membuat pasar khawatir mengenai produksi dari negara produsen minyak terbesar di Afrika tersebut. Ketidakstabilan dan kekerasan yang membuat produksi minyak di negara itu terpengkas seperempatnya.

Kekhawatiran bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) tidak akan meningkatkan produksinya juga diperkirakan berdampak pada pasar dalam jangka pendek, kata Moore.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

**KEBOCORAN SPBU MILIK PT SHELL INDONESIA**

Tanggapan Berita

Menanggapi berita yang beredar di beberapa media massa baik elektronik maupun cetak tentang adanya kebocoran tangki pendam beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang telah beroperasi milik PT Shell Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, maka bersama ini saya informasikan bahwa:

1. Seluruh SPBU milik PT Shell Indonesia yang telah beroperasi di Provinsi DKI Jakarta dan telah memiliki izin pengusahaan dari Kepala Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta (12 SPBU), tidak ada yang bocor, layak dan aman untuk dioperasikan karena pada saat proses pembangunan diawasi oleh petugas Dinas Pertambangan dan dilakukan pengujian pada tangki pendam dan jalur pipa distribusi BBM. Juga setiap SPBU dilengkapi dengan pemantau lingkungan yang telah kami periksa, meliputi sumur observasi dan sumur pantau serta *oil catcher*.
2. Seluruh SPBU yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta dan telah memiliki izin pengusahaan dari Kepala Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta (60 SPBU), tidak ada yang bocor, layak dan aman untuk dioperasikan karena pada saat proses pembangunan diawasi oleh petugas Dinas Pertambangan, dan dilakukan pengujian sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas.
3. Terhadap SPBU yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta dan belum memiliki izin pengusahaan dari Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta (SPBU lama sebelum dikelola Dinas Pertambangan sebanyak 221 SPBU) akan dilakukan audit kelayakannya pada tahun 2008, khususnya instalasi SPBU yang berumur 20 tahun ke atas.

Mohon kiranya berita ini dapat diinformasikan kepada masyarakat untuk meluruskan pemberitaan negatif mengenai kebocoran SPBU yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

**Ir Peni Susanti Dipl Est**

Nip 470046170

Kepala Dinas Pertambangan, Provinsi DKI Jakarta,

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLIKA

● SUARA KARYA  
○ SEPUTAR INDONESIA  
○ SUARA PEMBARUAN  
○ SINAR HARAPAN  
○ TABLOID KONTAN  
○ THE JAKARTA POST  
○ MAJALAH GATRA  
○ MAJALAH TEMPO  
○ MAJALAH TRUST  
○

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

## PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI

# Polda Metro Ringkus 71 Tersangka

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 242,7 ton bahan bakar minyak (BBM) diamankan jajaran Satuan Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya. BBM yang diduga hasil oplosan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi itu merupakan hasil pengamanan sejak November 2007 hingga Februari 2008.

Kata Wakil Direktur Reserse Khusus AKBP Tony Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/2), penyitaan barang bukti itu melibatkan 71 tersangka.

Perinciannya ialah, BBM jenis solar sebanyak 114.451 liter, minyak tanah 120.340 liter, dan residu 8.000 liter. Untuk mendukung tindak keja-

hatan mereka, tersangka menggunakan alat angkut 27 kendaraan, terdiri dari *pick-up*, truk, tangki, *dump truck*, serta satu unit tangki duduk dan lima mesin alkon.

Dalam aksinya, lanjut Tony, tersangka mengangkut, menyimpan, dan menjual BBM tanpa izin. Tersangka juga memperjualbelikan BBM bersubsidi, minyak oplosan solar, dan minyak tanah.

Informasi di Mapolda menyebutkan, aksi pengiriman BBM bermasalah akhir-akhir ini semakin ramai. Pelaku menggunakan kendaraan truk yang di dalam bak kayunya diisi tangki. Selanjutnya, tangki itu diisi minyak selundupan. Untuk mengelabui petugas di jalan raya,

pelaku menutup bak truk dengan terpal.

"Kalau kita lihat sepintas, penampilannya seperti truk pengangkut buah-buahan atau sayuran. Jam masuk wilayah Jakarta-nya juga hampir sama, yaitu mulai tengah malam hingga pagi subuh," katanya.

Namun, petugas tidak semudah itu diakali. Petugas yang sudah terlatih mengikuti truk-truk yang dicurigai dan mengendus bau minyak yang tumpah sedikit demi sedikit dalam perjalanan itu. Setelah dipastikan truk yang dicurigai membawa BBM, polisi langsung menghentikan truk dan memprosesnya.

Distribusi BBM ilegal ini lebih banyak berasal dari wilayah Bandung,

Jawa Barat (Jabar). BBM itu selanjutnya didistribusikan ke beberapa lokasi industri di daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang dan Bekasi.

"Di daerah Bekasi dan Tangerang terdapat banyak industri berskala besar dan kecil. Jika mereka semuanya menerima suplai BBM ilegal, itu akan sangat merugikan pemerintah," katanya.

Pelaku, lanjutnya, membeli BBM dengan harga di bawah pasaran dan menjual kembali ke sentra-sentra industri dengan harga juga di bawah harga BBM untuk industri. "Kalau keuntungan satu liternya mencapai Rp 2.000, berarti keuntungan mereka sangat besar," katanya. (Joko Sriyono)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2008



**BLOK NATUNA** – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin Rapat Terbatas Kabinet yang membahas negosiasi Blok D Alfa Natuna di daerah Kepulauan Riau, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/2). Apabila Blok D Alfa Natuna dioperasikan, maka akan menjadi investasi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena nilainya diperkirakan mencapai sekitar 30 miliar dolar AS berdasarkan perhitungan saat ini. (Ant/Rumgipres/Haryanto)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 1		
TAHUN 2008		

■ KONTRAK BLOK NATUNA D-ALPHA

## Pertamina Resmi Menjadi Penguasa Gas Natuna

Ruisa Khoiriyah, Yohan Rubiyantoro

JAKARTA. Minat Pertamina untuk menjadi penguasa lapangan gas di Natuna jadi kenyataan. Beberapa waktu lalu, Pertamina yakin pemerintah sudah menunjuknya sebagai pengelola lapangan gas yang terkenal dengan nama blok D-Alpha itu. Rapat kabinet terbatas Selasa (18/2) kemarin akhirnya resmi memutuskannya.

Pertamina pun menggeser posisi ExxonMobil Indonesia yang sudah 20 tahun mendepak blok kaya gas di Kepulauan Natuna itu. Selama ini, Pertamina adalah pemegang 26% saham di D-Alpha. Sisanya, tentu milik ExxonMobil.

Pemerintah mengalihkan D-

Alpha ke Pertamina lantaran negosiasi dengan ExxonMobil sudah mentok. "Exxon sudah kami beri waktu setahun plus dua tahun masa terminasi, tapi negosiasi belum ada titik temu. Akhirnya, Presiden minta Pertamina menyiapkan diri," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro.

Pemerintah memberi waktu tiga minggu pada Pertamina untuk menyiapkan kerangka kerja pengelolaan D-Alpha. Kerangka kerja itu, selain soal jadwal, juga menyangkut pembiayaan dan teknologi untuk menyedot gas D-Alpha yang kandungannya mencapai 75%. "Dari kerangka kerja itu pemerintah bisa mendapat gambaran apa saja persyaratan dan bantuan yang

diperlukan Pertamina," timpal Direktur Utama Pertamina, Arie H. Soemarno.

Pemerintah juga membentuk tim khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Perekono-

**Banyak pemain migas terkemuka yang menyatakan minat ikut serta.**

mian, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengkaji proyek ini. "Mereka akan bertindak sebagai pengarah Pertamina," tambah Ari.

Yang jelas, blok D-Alpha akan menjadi proyek Pertamina yang paling prestisius. "Ini akan menjadi proyek investasi terbesar sepanjang sejarah. Nilai investasinya lebih dari US\$ 30 miliar," kata Purnomo.

Dengan investasi segede itu, bisa dipastikan Pertamina akan menggandeng *partner* untuk mengeksplorasi blok ini. Sejauh ini, sudah ada banyak perusahaan migas terkemuka yang melamar untuk ikut bermain di D-Alpha. Di antaranya adalah Shell, StatOil, dan Total. Kabarannya, Pertamina juga tak menutup pintu buat ExxonMobil.

Sedangkan soal harga gasnya, Ari sudah memberi kisaran, yakni sebesar US\$ 14 per kakikubik. Namun siapa pembelinya, itu yang belum jelas benar.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

## SUARA MAHASISWA

# Smart Card dan BBM

**ASEP TAUFIK HIDAYAT**

Mahasiswa STAI Al Jawami Bandung

**PERIBAHASA** mengatakan, "bagai tikus mati di lubang". Mungkin peribahasa ini sangat tepat jika dianalogikan dengan kondisi negeri kita saat ini terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai bahan bakar minyak (BBM). Untuk mendapatkannya pun masyarakat harus menggunakan kartu alias dibatasi, yakni dengan sistem kartu kendali untuk minyak tanah dan *smart card* untuk solar dan premium.

Memang cukup aneh, negeri kita yang merupakan salah satu negara anggota OPEC (perkumpulan negara-negara pengekspor minyak) harus mengalami nasib seperti ini. Harus menerima kenyataan menjadi negara yang kekurangan minyak sehingga terpaksa pula harus melakukan impor minyak.

Salah satu bukti kekurangan itu adalah adanya rencana pembatasan penggunaan BBM (minyak tanah, solar, dan premium) melalui kebijakan "perkartuan" yang akan digulirkan pada bulan Mei mendatang. Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri meminta agar kebijakan ini tidak dilaksanakan secara terburu-buru, tetapi dia pun menegaskan bahwa siap tidak siap kebijakan ini harus diterima dengan siap.

Kita maklum atas adanya kebijakan tersebut. Kebijakan ini lahir sebagai sebuah tindakan antisipasi karena semakin minimnya produksi dari kilang-kilang minyak yang ada di negeri ini. Akan tetapi, permakluman ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah legitimasi untuk tidak berbuat apa-apa alias tidak mencari solusi lain yang tepat dan jitu untuk menyikapi kondisi perminyakan di negeri ini.

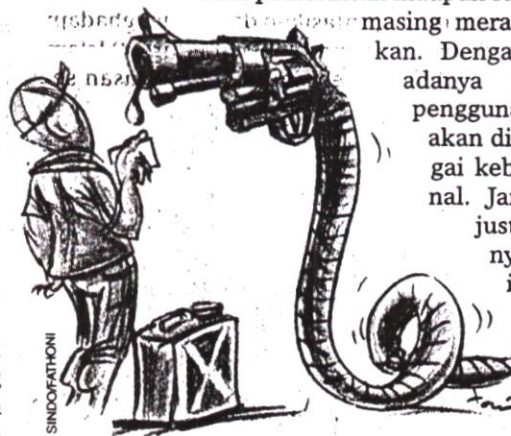
Mengapa? Karena yang namanya masyarakat kita saat ini adalah kebanyakan tidak mau tahu apa yang sedang dihadapi bangsa dan negara sesungguhnya. Yang ingin mereka ketahui hanya satu, yaitu apa yang mereka

butuhkan harus ada dan tersedia. Karena itu, jika kebijakan ini nantinya benar-benar dilaksanakan, mesti ada antisipasi munculnya unjuk rasa yang tidak hanya akan merugikan nilai-nilai ekonomi, tapi juga bisa merugikan nilai-nilai sosial.

Uji coba yang ditindaklanjuti dengan *pilot project*, untuk kemudian dievaluasi dan akhirnya disosialisasi, adalah hal yang tepat untuk dilakukan, sebelum benar-benar direalisasi. Disamping itu, unsur-unsur yang nantinya terlibat dilapangan, yakni Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan agen-agen BBM, harus benar-benar siap dalam menjalankan kebijakan ini. Jika masih terjadi "main kucing-kucingan", khususnya yang sering terjadi di tingkat agen, tindakan tegas perlu dilaksanakan. Jangan sampai setiap ada kebijakan, rakyat lagi dan rakyat lagi yang harus menjadi korban. Apalagi, kita mafhum bahwa kebijakan ini sebenarnya mempunyai tujuan baik, yaitu untuk "menyelamatkan" rakyat. Namun, di lapangan yang terjadi justru jauh panggang dari api. Inilah hal yang mesti diantisipasi.

Apalagi, sebagaimana dikatakan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dengan menggunakan sistem kartu kendali, akan ada penghematan subsidi minyak Rp1,3 triliun dan dengan penggunaan *smart card* pemerintah akan menghemat dana Rp 10 triliun. Tinggal bagaimana, dengan kebijakan ini,

baik pemerintah maupun rakyat masing-masing merasa diuntungkan. Dengan demikian, adanya pembatasan penggunaan BBM ini akan dianggap sebagai kebijakan rasional. Jangan sampai justru sebaliknya, kebijakan ini melahirkan masalah baru, yakni kerugian sosial dan material. (\*)



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA INVESTOR DAILY KOMPAS KORAN TEMPO KORAN KONTAN MEDIA INDONESIA NERACA PIKIRAN RAKYAT RAKYAT MERDEKA REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
---	--

KODE :  LISTRIK                       MINERAL, BATU BARA                       GEOLOGI  
 MIGAS    DAN PANAS BUMI     UMUM  
 ENERGI ALTERNATIF

JAN    **FEB**    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17 TAHUN 2008

# Operasi BBM Bersubsidi Jalan Terus

*Kerja Sama Warga Sangat Dibutuhkan*

**BANDUNG, (PR).-**  
 Kapolri Jenderal Sutanto memberikan apresiasi khusus terhadap pengungkapan kasus penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Polda Jabar pada Minggu (17/2). "Persoalan BBM cukup krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus sama-sama mengamankan distribusi BBM bersubsidi ini agar tidak disalahgunakan dengan mengoplosnya atau menjualnya ke industri," kata Kapolri kepada wartawan, di Hotel Preanger, Selasa (19/2).

Ia mengatakan, pengamanan BBM tidak semata-mata tugas aparat terkait, tetapi juga masyarakat. "Kerja sama dari warga sangat dibutuhkan, terutama informasi tentang keberadaan lokasi yang dipakai untuk menimbun atau mengoplos. Kegiatan itu melanggar hukum. Kalau ada anggota saya yang terlibat, tentu akan ditindak tegas. Saya telah memerintahkan seluruh jajaran di polda untuk terus melakukan operasi penerbitan dan pengamanan BBM bersubsidi," ucapnya.

Menurut Sutanto, salah satu penyebab utama maraknya

pengoplosan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ialah besarnya keuntungan yang dapat diraih. "BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah untuk rumah tangga hanya Rp 2.000,00 per liter. Sementara untuk industri, bisa tiga kali lipatnya. Itulah yang membuat banyak orang ingin menyalahgunakan BBM bersubsidi itu dengan menjualnya ke kalangan industri. Yang terjadi kemudian, munculnya kalangan BBM di berbagai tempat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar pada, Jumat (15/2), melakukan operasi penerbitan dan pengamanan distribusi BBM bersubsidi. Operasi yang dipimpin Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Supriyadi Usman itu, berhasil menyita 132,1 ton BBM dari para pelaku pelanggaran yang tersebar di 12 kabupaten di Jawa Barat. Dalam operasi itu, polisi menemukan sebuah pabrik dan laboratorium di Kab. Bogor, yang dipakai untuk pembuatan oli palsu Pertamina.

Sebanyak 55 orang dijadikan tersangka dalam kasus itu. Para pelaku akan dikenakan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal-pasal yang dikenakan terhadap tersangka antara lain pasal 53, 54, dan 55. Di pasal 53 terbagi lagi yaitu ayat a tentang Pengolahan tanpa Izin (ancaman penjara 5 tahun), ayat b tentang Pengangkutan tanpa Izin (ancaman 4 tahun penjara), ayat c tentang Penyimpanan tanpa Izin (3 tahun penjara), dan ayat d tentang Niaga tanpa Izin (3 tahun). Sementara itu, pasal 54 tentang Memalsukan BBM (ancaman 6 tahun), dan pasal 55 tentang Pengangkutan/Niaga BBM yang Bersubsidi. Selain ancaman hukuman penjara,

para pelaku juga terancam denda hingga Rp 5 miliar.

**Internal Polri**

Soal kasus penyelundupan senjata api yang melibatkan warga Bandung, Kapolri mengatakan, penyelidikannya masih terus berjalan. Penyelidikan dilakukan pula internal Polri terkait dugaan keterlibatan anggota polisi dalam kasus itu.

"Soal internal, penyelidikananya terkait dugaan adanya barang selundupan tadi dimasukkan ke satuan polisi yang diduga melibatkan anggota dari institusi Polri," ujarnya. (A-128/CA-184)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008



**KAPAL BARU  
 PERTAMINA.** Direktur  
 Utama Pertamina, Ari H.  
 Soemarno (kiri) dan Direktur  
 Utama PT Dok dan  
 Perkapalan Surabaya, M.  
 Firmansyah Arifin (kanan)  
 menandatangani kontrak  
 pembangunan dua unit  
 tangker minyak 6.500  
 LTDW pesanan Pertamina  
 senilai 29.157.000 dolar AS  
 di Jakarta, kemarin.

Sedangkan 5 unit kapal  
 type 30.000 LTDW dibuat  
 digalangan kapal Zhejiang  
 Chengde Shipbuilding Co.  
 Ltd.

Foto: ZAMBA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

TUBAGUS HARYONO,  
KEPALA BPH MIGAS:

## Kartu Pintar Telah Dirancang Dan Tak Bisa Dipindahkan

KEPALA Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menjelaskan, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi merupakan keputusan pemerintah yang harus segera dilaksanakan.

Namun, pihaknya masih memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan survei pengguna BBM dengan teknis pendataan yang lebih detail.

Misalnya, kata dia, survei menyangkut jenis kendaraan roda dua dan roda empat. Ada pemikiran, kelak BBM bersubsidi hanya boleh dinikmati kendaraan roda empat milik pribadi, dinas, dan angkutan umum.

"Kalau kendaraan mewah tidak layak lagi mengonsumsi BBM bersubsidi. Untuk itu, sekarang kita perlu menghitung jarak tempuh rata-rata harian kendaraan pribadi, dinas, maupun angkutan umum," kata Tubagus.

Tubagus mengatakan, pada tahap pertama, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diterapkan langsung di seluruh Pulau Jawa, tidak lagi sebatas di wilayah Jabodetabek. Jika

hanya di Jabodetabek, katanya, kebijakan tersebut akan memicu pembelian besar-besaran (*rush*) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah perbatasan kota.

Teknis pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini dilakukan dengan memasang alat pemindai secara online di 2.523 SPBU. Dengan itu bisa diketahui secara pasti volume BBM yang didistribusikan serta jumlah subsidi yang terserap.

"Untuk menghindari penyalahgunaan, kartu pintar telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan ke kendaraan lain."

Untuk persiapan pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini, BPH Migas kini intensif berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditlantas Mabes Polri.

Tubagus mengakui, pelaksanaan keputusan tentang itu memerlukan sosialisasi yang tepat dan merata di masyarakat.

"Untuk itu, kita perlu waktu untuk menyelesaikan survei

secara akurat serta melakukan sosialisasi," ujarnya.

Pemerintah berharap program pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU dengan metode kartu pintar ini bisa diterima khalayak luas.

Ini penting karena beberapa program lain dalam rangka menekan konsumsi BBM bersubsidi kandas di tengah jalan akibat tidak mendapat dukungan masyarakat, misalnya program konversi premium ke pertamax.

Tubagus menyebutkan, penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan memperhitungkan berbagai aspek agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diterapkan serta mendapat dukungan masyarakat.

"Contohnya angkutan umum yang memiliki jarak tempuh cukup sampai 300 kilometer per hari pasti diberi kelonggaran dalam membeli BBM bersubsidi. Dengan demikian, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tak lantas berdampak menaikkan ongkos angkutan umum sehingga masyarakat luas tidak terbebani." ■ FIK

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

- KODE :  LISTRIK                       MINERAL, BATU BARA                       GEOLOGI  
 MIGAS                                      DAN PANAS BUMI                                       UMUM  
 ENERGI ALTERNATIF

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

## Pertamina Diminta Siap Kelola Natuna

JAKARTA (SINDO)—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta PT Pertamina menyiapkan diri mengelola Blok Natuna D Alpha. Jika telah dioperasikan, blok migas ini akan menjadi investasi terbesar dalam sejarah dengan nilai mencapai USD30 miliar.

"Negosiasi Natuna dengan Exxon sudah berjalan hampir selama satu tahun dan ada delapan *pending issue* yang sangat sulit kami putuskan. Untuk itu, Presiden meminta Pertamina segera bersiap diri," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengutip pernyataan Presiden seusai mengikuti rapat terbatas tentang Blok Natuna di kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.

Rapat terbatas tersebut dipimpin langsung oleh Presiden dan Wapres Jusuf Kalla. Hadir dalam rapat tersebut menteri-menteri terkait, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perencanaan Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Ketua Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus

Haryono, dan Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno.

Purnomo menjelaskan, untuk melakukan persiapan ini, Pertamina telah meminta waktu selama tiga minggu sebelum kembali melaporkan hasil persiapan kepada Presiden. Dia menambahkan, meski Pertamina belum pernah melakukan operasi penambangan lepas pantai (*offshore*) dalam skala sangat besar, BUMN migas itu telah menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan Blok Natuna D Alpha.

Sementara itu, Ari H Soemarno mengatakan bahwa ada tiga tantangan teknologi dalam pengembangan blok tersebut, yaitu teknologi penghilangan CO<sub>2</sub>, teknologi pembuangan CO<sub>2</sub>, dan teknologi produksi mengingat lokasi yang berada di laut lepas dengan kedalaman 300-400 meter. "Itu semua memerlukan dana sangat besar," imbuhnya.

Ari mengungkapkan, sejumlah perusahaan migas multinasional sudah menyatakan minatnya untuk menjadi rekanan Pertamina dalam pengelolaan blok migas tersebut.

(rarasati syarief/  
ferial thalib)

34

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

## Pertamina Beli 2 Unit Kapal Tanker

JAKARTA (SINDO) – PT Pertamina (persero) membeli dua unit kapal tanker baru tipe 6.500 LTDW (Long Ton Dead Weight) senilai USD29,157 juta dari PT Dok & Perkapalan (persero) Surabaya. "Pengadaan dua unit kapal tersebut akan selesai Maret dan September 2011," ujar Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, pengadaan dua kapal tersebut merupakan pesanan yang keenam dari PT Dok & Perkapalan. Dari perusahaan tersebut, Pertamina telah membeli sebanyak empat buah kapal.

Ari mengungkapkan, dari 130 buah kapal yang dimiliki Pertamina, 80% di antaranya merupakan kapal sewaan. Dengan demikian, lanjut dia, pengadaan dua buah kapal baru ini akan memperkuat armada milik Pertamina. Selain itu, akan meningkatkan posisi tawar Pertamina terha-

dap kapal sewaan.

Dia mengungkapkan, PT Dok dipilih karena perusahaan tersebut memberikan tawaran terbaik dan kompetitif. "Sebagai sesama BUMN, kita harapkan dapat meningkatkan sinergi dan cari peluang untuk kerja sama," tandasnya.

Di samping memesan kapal dari dalam negeri, Ari mengungkapkan, Pertamina juga telah memesan pengadaan kapal sebanyak lima unit kapal tipe 30.000 LTDW dari galangan kapal Zhejiang Chenge Shipbuilding Co Ltd. Dalam waktu dekat, kata dia, kontrak pemesanan akan ditandatangani kedua belah pihak.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan (persero) Muhammad Firmansyah Arifin menjanjikan pembuatan kapal pesanan Pertamina akan diselesaikan tepat waktu.

(ferial thalib)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8.2

TAHUN 2008

# Presiden Tugas Pertamina Kelola Natuna

Pemerintah akan membentuk tim setingkat menteri.

**JAKARTA** — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pertamina melakukan persiapan terkait dengan pengelolaan lapangan gas di laut dalam Blok Natuna D-Alpha. Perusahaan minyak milik pemerintah itu diberi waktu tiga minggu untuk melakukan studi. "Hasilnya diminta dilaporkan kepada Presiden dalam tiga minggu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro setelah rapat pembahasan gas Natuna kemarin.

Menurut Purnomo, Presiden menekankan bahwa persiapan ini penting karena investasi senilai US\$ 30 miliar. "Apabila itu dioperasikan, itu akan menjadi investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia," katanya.

Pemerintah, kata Purnomo, mengakui Pertamina belum pernah mengoperasikan lapangan lepas pantai dengan investasi sebesar itu. "Kami menyadari ini satu tantang-

an bagi Pertamina. Presiden betul-betul menekankan agar dipersiapkan Pertamina," katanya.

Presiden juga meminta dibentuknya tim pemerintah setingkat menteri untuk merumuskan langkah-langkah ke depan yang bersifat nonkorporat. "Karena ini nantinya mempunyai permasalahan yang cukup luas," kata Purnomo. Tim pemerintah diminta merumuskan masalah pengembangan daerah perbatasan karena blok ini terletak di perbatasan.

Pemerintah juga mempersilakan Pertamina mencari mitra kerja untuk mengelola ladang gas Natuna tersebut. Pertamina akan menyiapkan studi kelayakan untuk mencari mitra kerja yang dapat mendukung pendanaan dan teknologi Pertamina.

Namun, instruksi Presiden itu tidak jelas menyebutkan status ExxonMobil yang sebelumnya pengelola Natuna. Pemerintah tidak secara jelas menyebutkan pemutusan kerja dengan ExxonMobil. "Akan saya sampaikan (hasil sidang kabinet) pada ExxonMobil melalui surat," kata Purnomo.

Ia menolak berkomentar mengenai kemungkinan masuknya ExxonMobil sebagai mitra Pertamina untuk mengelola Blok Natuna. "Itu terserah Pertamina," ujarnya.

Pemerintah, kata Purnomo, akan menyampaikan delapan isu yang masih menjadi masalah dengan ExxonMobil, antara lain masalah pajak, periode kontrak, tahapan dan pengakhiran kontrak lebih awal, jaminan pemerintah, serta depresiasi. Tiga di antara delapan masalah ini berkaitan dengan undang-undang sehingga sulit diselesaikan.

Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno menjelaskan tiga tantangan dalam mengelola Blok Natuna. Tantangan itu adalah teknologi penghilangan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), teknologi pembuangan kembali penyimpanan CO<sub>2</sub>, dan fasilitas lokasi produksi di laut lepas dengan kedalaman 300-400 meter.

Ari mengatakan empat investor tertarik mengelola Blok Natuna, yaitu ExxonMobil, Shell, StatOil, dan Total. Namun, dia belum bisa menyatakan perusahaan multinasional mana yang akan dipilih oleh Pertamina. ● FANNY FEBIANA | ALI NY

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8.2

TAHUN 2008

### Harga Minyak Dekati US\$ 96 per Barel

**NEW YORK** — Harga minyak mentah pada perdagangan awal pekan ini mendekati US\$ 96 per barel. Hal itu dipicu oleh spekulasi terganggunya produksi akan menyebabkan ketatnya persediaan minyak. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang akan melakukan pertemuan pada 5 Maret nanti, memprediksi akan terjadi penurunan permintaan sebesar 1,8 persen seiring dengan berlalunya musim dingin. Demikian berita yang dilansir *Bloomberg*.

Organisasi itu menurunkan pertumbuhan permintaan minyak menjadi 1,4 persen karena kekhawatiran terjadinya resesi di Amerika Serikat.

"OPEC pasti tidak akan membiarkan surplus persediaan minyak terus berkembang," ujar David Moore, analis Commonwealth Bank of Australia, Sydney, "Pasar minyak, terutama sektor pengilangannya, telah dikepung banyak masalah."

Harga minyak mentah naik menuju posisi US\$ 95,89 per barel pada perdagangan New York Mercantile Exchange. Adapun di London ICE, minyak *brent* naik 28 sen (0,3 persen) ke US\$ 99,91. ● SORTA TOBING

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8, 5

TAHUN 2008

### **Direksi Pertamina Bakal Dirombak**

**JAKARTA** — Pemerintah sedang mendiskusikan perombakan direksi di PT Pertamina. "Masih dalam proses," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil di kantor Presiden, Jakarta.

Namun, dia enggan menyebutkan nama dan waktu pembentukan direksi baru. "Ya, saya perlu ketemu Tim Penilai Akhir dulu," kata Sofyan.

Selain akan merombak direksi Pertamina, Sofyan menegaskan, pemerintah sudah mengantongi nama calon Direktur Utama Bank Mandiri. "Sudah dong, nama-nama yang kami anggap cukup kredibel dan cukup bagus untuk Bank Mandiri," kata Sofyan. Direktur Utama Bank Mandiri saat ini, Agus Martowardojo, dicalonkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia. ● FANNY FEBIANA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2008

**Presiden Minta Pertamina Siapkan Rencana Aksi**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan PT Pertamina (Persero) untuk mempersiapkan diri mengelola ladang gas alam Blok Natuna D-Alpha di laut dalam Natuna, Kepulauan Riau. Untuk itu, Pertamina diminta membuat rencana aksi dan studi kelayakan terkait pengelolaan ladang gas tersebut dalam waktu dua hingga tiga minggu dari sekarang. Keputusan Presiden Yudhoyono itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam keterangan pers sesuai mengikuti rapat terbatas khusus mengenai perkembangan negosiasi Blok Natuna D-Alpha dengan PT ExxonMobil Indonesia di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/2). (HAR)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T. 4

TAHUN 2008

## Eksplorasi



**Jaringan pipa gas timur – barat  
PetroChina**

Panjang pipa	8.000 km
Titik jaringan pipa	Xinjiang-Shanghai-Guandong
Pasokan gas	30 miliar kaki kubik
Asal gas	Turkmenistan
Lama kontrak	2010-2040
Investasi	US\$14 miliar

### PetroChina bangun jaringan pipa gas terbesar di dunia US\$14 miliar

**BEIJING:** PetroChina Co. mulai membangun jaringan pipa gas terpanjang di dunia yang menghubungkan dataran China di wilayah timur hingga ke barat minggu ini dengan dana investasi US\$14 miliar.

Dalam rangka pembangunan jaringan pipa gas itu, BUMN perminyakan China itu akan mengadakan peresmian pembangunan konstruksinya pada 22 Februari di Beijing. "Kami akan mengadakan acara dimulainya konstruksi jaringan pipa itu pada 22 Februari," Vice GM Produksi Gas Alam dan Unit Pemipaan PetroChina Hou Chuangye kemarin.

Jaringan pipa gas itu akan menghubungkan dari wilayah produksi gas di Provinsi Xinjiang di timur ke pusat industri dan komersial di wilayah barat seperti Shanghai dan Guandong. PetroChina telah menandatangani kontrak pembelian gas dengan Turkmenistan sebesar 17 miliar kaki kubik selama 30 tahun. Gas asal Turkmenistan itu nantinya melalui beberapa jaringan pipa di Uzbekistan dan Kazakhstan ke Provinsi Xinjiang. (Bloomberg/tn)

Sumber: PetroChina, Bloomberg

BISNIS/ADI PURDIYANTO

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T.4

TAHUN 2008



RUMGAPRES/ABROR RIZKI

**INVESTASI NATUNA:** Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (*kedua kanan*) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Rapat tersebut membahas negosiasi Blok D-Alfa Natuna di daerah Kepulauan Riau. Apabila Blok D Alfa Natuna telah beroperasi maka akan menjadi investasi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena nilainya diperkirakan mencapai sekitar US\$30 miliar.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
--	--


KODE :  LISTRIK                       MINERAL, BATU BARA                       GEOLOGI  
 MIGAS                                      DAN PANAS BUMI                                       UMUM  
 ENERGI ALTERNATIF

JAN   FEB   MAR   APR   MEI   JUN   JUL   AGST   SEPT   OKT   NOV   DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

**Minyak capai level harga US\$96/barel**

 SINGAPURA: Harga minyak mentah kemarin di New York mencapai level US\$96 per barel, setelah sehari sebelumnya sempat dipengaruhi aksi organisasi negara peng-ekspor minyak (Organization of the Exporting Countries/OPEC) yang akan memotong produksinya. OPEC, pemasok 40% dari total kebutuhan minyak global, berencana memotong produksi pada musim dingin, menyusul makin berkurangnya permintaan. "OPEC menginginkan harga minyak tertahan pada level tinggi," kata Tetsu Emori, pengelola dana dari Ast-max Ltd, Tokyo. Nilai kontrak berjangka minyak untuk pengiriman Maret di New York Mercantile Exchange kemarin naik US\$0,83 menjadi US\$96,33 per barel. (BLOOMBERG/ADN)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T. 4

TAHUN 2008

## Pertamina order tanker ke PT Dok & Perkapalan

Oleh RUDI ARIFFIANTO  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) menandatangani kontrak pembuatan dua unit tanker untuk angkutan produk minyak tipe 6.500 LTDW (Long Ton Dead Weight) dengan PT Dok&Perkapalan (Persero) senilai US\$29,157 juta.

Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengatakan Pemesanan dua tanker tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk mendatangkan sedikitnya tujuh tanker pada 2008. Lima tanker lainnya bertipe 30.000 LTDW akan dibuat di galangan Zhejiang Chengde Shipbuilding Co China.

"Itu merupakan bagian rencana jangka panjang Pertamina untuk memperkuat armada, meningkatkan nilai aset perusahaan, dan meningkatkan posisi tawar perusahaan di pasar," ujarnya kemarin.

Kedua tanker tersebut, katanya, dijadwalkan selesai pada 2011 dalam dua tahap, satu unit pada 31 Maret unit kedua akan selesai pada 30 September.

Ari mengatakan pembangunan dua kapal tanker ini merupakan upaya untuk meremajakan kapal tanker yang dimiliki Pertamina.

Dari 130 kapal tanker yang dioperasikan Pertamina di seluruh Indonesia, tuturnya, 80% merupakan kapal tanker sewa.

Dengan tambahan armada tersebut, katanya, diharapkan secara bertahap ada keseimbangan antara tanker sewa dengan milik Pertamina sendiri.

Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Firmansyah Arifin mengungkapkan dua kapal tanker ini merupakan kapal tanker kelima dan keenam yang dipesan Pertamina ke BUMN perka-

palan itu. Sebelumnya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sudah menyelesaikan pesanan empat kapal tanker untuk Pertamina.

"Pengalaman di empat tanker sebelumnya akan sangat membantu penyelesaian dua kapal tanker ini tepat waktu," paparnya.

Sedangkan lima tanker dari China, kata Ari, pihaknya akan melakukan penandatanganan serupa dalam waktu dekat.

Kapal tersebut, tutur dia, akan menerapkan teknologi ramah lingkungan, di antaranya *common structural rules, clean notation, ballast tank water management*, dan *vapour control system*.

Semula, Pertamina juga merencanakan memesan kapal bertipe 80.000 LTDW. Namun, rencana tersebut kemungkinan belum bisa dilakukan tahun ini karena masih dalam tahap negosiasi.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

# Percepat Diversifikasi Energi

**JAKARTA (SINDO)** – Pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan berbagai program diversifikasi energi, menyusul ketidaksiapan konsep pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi menilai diversifikasi energi lebih tepat untuk menghemat anggaran subsidi BBM dibanding program pembatasan. Menurut dia, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji dan mengalihkan penggunaan BBM transportasi umum ke bahan bakar gas (BBG). "Kita memiliki gas yang banyak," ujarnya di Jakarta kemarin.

Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong produksi bahan bakar nabati (BBN) melalui pemberian insentif kepada produsen. "Hal-hal tersebut dapat berjalan bila pemerintah serius dan memiliki kemauan yang kuat untuk menjalankannya," katanya.

Seperti diberitakan, belum lama ini pemerintah berencana membatasi masyarakat dalam mengonsumsi BBM bersubsidi. Program itu akan diberlakukan secara terbatas mulai Mei 2008 dan diharapkan dapat menghemat anggaran subsidi Rp10 triliun.

Namun, Senin (18/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta rencana pembatasan konsumsi BBM tidak dilakukan terburu-buru. Presiden mengharapkan sistem tertutup itu disosialisasikan lebih dulu, tidak perlu harus dimulai Mei.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Mining, Energy, and Environmental Reform "ReforMiner Institute" Pri Agung Rakhmanto mengatakan, dalam jangka pendek tidak ada cara lain yang harus dilakukan pemerintah selain mengubah

formula penghitungan subsidi BBM. Mekanisme penghitungan subsidi BBM dengan formula Mean Oil Platts Singapore (MOPS) + Alpha bisa diganti dengan sistem *cost and fee*. "Potensi penghematan anggaran subsidi yang dapat diperoleh dengan mengganti formula ini bisa mencapai 10% dari total anggaran subsidi BBM," jelas Pri.

Menurut dia, cara ini dapat terus diterapkan selama sistem subsidi harga BBM diberlakukan. Untuk jangka panjang, program diversifikasi energi juga harus serius digarap pemerintah. "Meski tidak mudah, tetapi harus tetap dijalankan," katanya.

Sementara itu, Departemen Keuangan (Depkeu) menyatakan hanya sanggup membuat anggaran subsidi untuk konsumsi BBM sesuai patokan APBN 2008, yaitu 35,5 juta kiloliter. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu, kendati volume itu tidak berubah dari patokan APBN 2008, jumlah anggarannya sudah melonjak sekitar 131% karena asumsi harga minyak dunia dan

parameter produksi BBM berubah.

"Bagi Depkeu, anggaran subsidi itu tetap untuk 35,5 juta kiloliter. Yang penting bagaimana program penghematan konsumsinya," ujar Anggito di Jakarta kemarin.

Penundaan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak lantas membuat pemerintah menambah jumlah volume BBM yang disubsidi. Masih ada cara lain yang akan dilakukan agar konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat tidak melebihi alokasi tersebut. "Bagaimana programnya, diserahkan pada departemen teknis. Pokoknya penghematan harus tetap dijalankan," katanya.

Dalam dokumen RAPBN Perubahan 2008 yang telah diserahkan kepada DPR, terungkap bahwa anggaran subsidi energi melonjak 113,2% dari semula Rp75,6 triliun pada APBN 2008, menjadi Rp161,2 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada subsidi BBM, dari Rp45,8 triliun menjadi Rp106,2 triliun.

Disusul subsidi listrik yang naik 84,7%, dari semula Rp29,8 triliun menjadi Rp55 triliun.

Terdapat tiga langkah penghematan yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan anggaran subsidi tetap Rp161,2 triliun. *Pertama*, memperbaiki parameter konsumsi BBM dan listrik, seperti penurunan 1% alpha pada produksi BBM bersubsidi oleh PT Pertamina.

*Kedua*, mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji. *Ketiga*, gerakan penghematan BBM dan listrik melalui berbagai program seperti pembagian gratis

50 juta lampu hemat energi serta penggunaan BBM non-subsidi dan *biofuel*.

Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prijambodo melihat rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis solar dan premium melalui kartu pintar (*smart card*) perlu persiapan matang.

"Jangan buru-buru, karena yang dituju adalah timbulnya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya hemat BBM," ujar Bambang.

(ferial thalib/  
zaenal muttaqin/  
muhammad ma'ruf)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

# Pertamina hanya sanggup minoritas di Natuna D-Alpha

Oleh RATNA ARIYANTI, IRSAD SATI &  
RUDI ARIFFIANTO  
*Bisnis Indonesia*

**JAKARTA: PT Pertamina hanya sanggup menjadi pemegang saham minoritas di Blok Natuna D-Alpha, meski pemerintah sudah memastikan BUMN itu sebagai operator menggantikan ExxonMobil.**

Dalam rangka mengelola blok itu, pemerintah juga akan membentuk sebuah tim tingkat menteri untuk pengembangan daerah perbatasan, selain menyangkut unsur teknis dan ekonomi megaprojek tersebut.

Dirut Pertamina Ari Hernanto Soemarno mengatakan BUMN itu mungkin menjadi pemegang saham minoritas. Hal ini mengingat tantangan terbesar dari megaprojek tersebut adalah pendanaan, yang mencapai US\$52 miliar.

"Kita lihat saja di kegiatan *upstream*, bisa saja minoritas menjadi operator," katanya kemarin.

Pertamina, menurut Ari, pasti membutuhkan mitra besar yang andal secara teknologi

dan keuangan di blok yang diperkirakan menjadi proyek terbesar di dunia itu.

Dengan asistensi tim pemerintah, Pertamina akan mengevaluasi seluruh perusahaan peminat. Dalam evaluasi itu, kepentingan negara dan nilai tambah terbaik akan dijadikan sebagai acuan.

BUMN perminyakan itu juga mencari mitra untuk menggarap megaprojek tersebut. Sejumlah perusahaan besar seperti StatOil, Shell, Total, Petronas, PTT Thailand, ExxonMobil, dan beberapa perusahaan China sudah menyatakan minat mereka masuk ke blok itu.

"Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memilih mitra kerja yang dianggap paling layak," ujar Ari usai mengikuti rapat terbatas mengenai Blok Natuna D-Alpha dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin.

Rapat itu dihadiri pula oleh Wapres Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan Kepala BP Migas.

Menteri ESDM Purnomo Yudiantoro menjelaskan Presiden Yudhoyono juga meminta Pertamina mempersiapkan secara rinci rencana kerja, terutama menyangkut rencana pengelolaan Blok Natuna D-Alpha.

"Presiden menegaskan persiapan Pertamina penting. Jangan

45

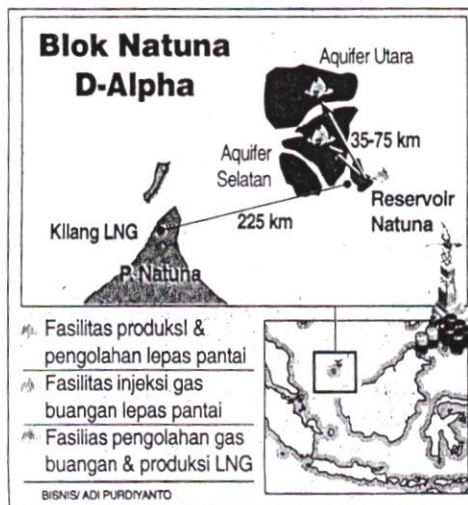
sampai dalam kesempatan yang cukup baik ini Pertamina tidak bisa melangkahakan kakinya dengan baik. Proses negosiasi dengan Exxon-Mobil yang buntu menjadi pertimbangan keputusannya keputusan Presiden,” tegasnya.

### Bentuk tim

Dalam rapat terbatas itu, Kepala Negara juga menginstruksikan pembentukan tim pemerintah pada tingkat menteri terkait dengan pengembangan daerah perbatasan.

“Persoalan pengelolaan Blok Natuna D-Alpha ini tidak hanya mencakup unsur teknis dan ekonomi, tapi juga terkait dengan pengembangan daerah perbatasan. Tim pemerintah itu akan bekerja pada tingkat yang lebih makro.”

Menyangkut kesanggupannya menggarap megaprojek itu, Ari menjelaskan Pertamina



akan membuat *term of reference* (TOR) sebagai acuan pemerintah guna mendapatkan gambaran persyaratan dan asistensi yang diperlukannya. Pertamina juga akan menyusun studi kelayakan proyek yang ditargetkan tuntas dalam tiga pekan.

Ari menilai megaprojek Natuna D-Alpha sangat layak dikembangkan. “Kalau tidak ekonomis, buat apa dikembangkan. Bila melihat

minat ExxonMobil yang sangat besar, berarti proyek tersebut memang sangat ekonomis.”

Proyek itu diperkirakan menelan dana US\$52 miliar. Hanya saja, tuturnya, mahalanya proyek itu bisa ditutup oleh tingkat harga gas yang cenderung meningkat.

Bila terealisasi, proyek itu akan menelan investasi terbanyak di Indonesia. Bahkan fasilitas produksi yang dibangun akan menjadi yang terbesar di dunia.

“Ketika saya menangani proyek itu secara pribadi, 20 tahun lalu, mungkin diperlukan anjungan lepas pantai sebanyak lima hingga enam yang masing-masing besarnya sama dengan lapangan bola. Peralatannya juga banyak,” ujar Ari. ([ratna.ariyanti@bisnis.co.id](mailto:ratna.ariyanti@bisnis.co.id)/[irsad.sati@bisnis.co.id](mailto:irsad.sati@bisnis.co.id)/[rudi.ariffianto@bisnis.co.id](mailto:rudi.ariffianto@bisnis.co.id))

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

## SBY orders Pertamina to gear up for Natuna block

TAHUN 2008

**Rendi Akhmad Witular  
and Ika Krismantari**  
*The Jakarta Post/Jakarta*

President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday instructed state oil and gas company Pertamina to prepare to take over the development of the gas-rich Natuna block from U.S. energy giant ExxonMobil Corp.

Yudhoyono has given Pertamina three weeks to come up with a detailed plan of development for exploring the largest natural gas reserve in Southeast Asia before making a final decision to scrap ExxonMobil's

rights to operate the block.

"The President has ordered Pertamina to get ready for taking over the block. The company will have to prepare the plan of work before the president decides to officially granted the block," Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro told said at the Presidential Palace.

However, Purnomo declined to elaborate on what step the government would take next should Pertamina's upcoming work plan fail to impress the President.

Yudhoyono's instruction comes following a recent

deadlock in negotiations between the government and ExxonMobil on extending the development of the Natuna D-Alpha block, estimated to hold 46 trillion cubic feet of gas.

Under existing regulations, Pertamina stands first in line to take over when contracts with private developers are terminated.

The government claims ExxonMobil's rights expired in 2005 after it failed to show any progress in developing the field.

ExxonMobil has denied the claim, saying it retained its rights to the block after having sunk some \$400 million into

exploration.

The issues over which negotiations foundered, according to Purnomo, were revenue sharing and taxes, contract term and termination, government guarantee, asset depreciation, sunk costs and first-tranche petroleum arrangements.

"We have given ExxonMobil two years to negotiate and to come up with latest feasibility study. But they have failed to meet our requirements, forcing us to shift their rights," he said.

ExxonMobil holds a 74 percent participating interest in the block, while Pertamina holds the remaining 26 percent.

Pertamina president director Ari Soemarno said the work plan to be presented to Yudhoyono would include a financing scheme, feasibility study, technology capability, as well as potential partners.

"It is going to be a complicated project as it will need advanced technology for separating carbon dioxide from the gas. If it is realized it will be the world's largest offshore gas exploration ever," he said.

Ari said several global energy giants, such as Royal-Dutch Shell, Total SA, StatOil and ExxonMobil, were interested in forming a partnership with

Pertamina to develop the block.

The government has estimated at least \$30 billion would be needed to develop the block. However, Pertamina previously said the investment could soar to as much as \$52 billion, making it the largest investment in Indonesian history.

Meanwhile, ExxonMobil Oil Indonesia spokeswoman Deva Rachman told *The Jakarta Post* the company had not yet been advised by the government on this plan.

She said the company hoped negotiations would go on and a win-win solution could be reached in the near future.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (19) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

## Aset Pertamina EP Dikeluarkan dari Neraca Awal

Jakarta - Pemerintah mengeluarkan aset Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP), anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hulu, dari neraca awal BUMN perminyakan tersebut. Dengan demikian, penyertaan modal negara (PMN) pada Pertamina menyusut menjadi Rp 83 triliun.

Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Hadiyanto mengatakan, pengeluaran aset Pertamina EP dari Pertamina dilakukan untuk meluruskan pelaporan aset sehingga sesuai dengan perlakuan akuntansi pemerintah terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

"Supaya meluruskan, aset yang digunakan dalam rangka production sharing. Jadi, sebagai operator di hulu, EP itu sekarang menggunakan aset negara, sehingga sesuai dengan sistem perlakuan akuntansinya dan kontraknya sama dengan ketentuan KKKS lain," ujarnya, Senin (18/2).

Sebelumnya, dalam neraca awal sementara yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 454 Tahun 2005 tentang Neraca Sementara Pertamina, total PMN mencapai Rp 106 triliun. Namun, dengan dikeluarkannya aset yang dimiliki Pertamina EP sebesar Rp 16 triliun, PMN menjadi Rp 83 triliun.

Dengan pemisahan aset tersebut, Pertamina EP bisa mencari pendanaan untuk usaha dengan basis neraca terpisah dari Pertamina. "Sekarang EP sudah bisa melakukan berbagai investasi dengan berbasiskan pada PMN itu," ujar Hadiyanto.

Ia melanjutkan, dengan penetapan PMN tersebut, Pertamina telah memiliki neraca definitif. "Neraca Pertamina sudah ditetapkan," tegasnya.

Manager Humas Pertamina EP Mochamad Harun mengatakan, dengan pemisahan tersebut Pertamina EP dimungkinkan untuk mencari pendanaan sendiri. Namun, upaya pendanaan tersebut belum akan dilakukan tahun ini.

Total belanja Pertamina EP tahun ini mencapai US\$ 1,65 miliar. (esther fin harini)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- BIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN					FEB					MAR					APR					MEI					JUN					JUL					AGST					SEPT					OKT					NOV					DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																													

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

## SPBU SHELL SERPONG BERMASALAH Bikin Cemar Sumur Warga

**TANGERANG, RM.** Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) *Shell* bermasalah lagi. Keberadaan pom bensin yang terletak di Jalan Raya Serpong, KM 7, Serpong ini dikesampingkan warga. Ada dugaan, *Under Ground Tank* (UGT) milik *Shell* bocor dan mencemari sumur warga Kampung Priang, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong.

Akibat pencemaran itu, kondisi air sumur warga menjadi bau solar yang menyengat. Karena tak mau mengambil resiko didemo warga, *Shell* sudah menutup pom bensin ini sejak lima hari lalu. Ketua RW2/RT5, Kampung Priang, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Ahiruddin mengakui sudah mendapat laporan Wiyah, seorang warganya soal pencemaran itu. Katanya, sejak pom bensin *Shell* berdiri sebulan lalu, sumur milik Wiyah yang berjarak 4 meter dari

tong penampungan bahan bakar *Shell*, tercemar solar.

Air sumur Wiyah, tercemar minyak dan mengeluarkan bau yang menyengat dan membuat 20-an warga Priang enggan mengkonsumsi air sumur tersebut. "Mereka takut menggunakan air sumur itu. Katanya, baunya menyengat dan tidak enak diminum," kata Ahiruddin menirukan keluhan Wiyah.

Ditemui di rumahnya, Wiyah mengatakan, sebelum *Shell* beroperasi, dia dan 20-an warga lainnya bebas menggunakan air sumur untuk dikonsumsi, mandi dan MCK. Setelah beroperasi, entah mengapa air sumur miliknya berubah jadi bau menyengat hingga Wiyah dan warga sekitar enggan menggunakan air sumur.

Menurut Wiyah, pihak *Shell* telah menyanggupi pembuatan sumur baru bagi warga. Sayangnya, sumur ganti rugi hanya satu buah dan diperuntukan bagi puluhan warga Kampung Priang. Karena itu, Wiyah berharap pihak

*Shell* membangun sumur-sumur baru bagi warga.

Sementara itu, pengelola *Shell* Serpong, Fathia Syarif menolak dikonfirmasi melalui percakapan telepon. Fathia bersedia memberikan keterangan melalui sms atau pesan singkat. Isi sms mengatakan, UGT atau penampungan minyak milik *Shell* mengalami cacat. Maka, pihaknya terpaksa menutup sementara waktu *Shell* itu. "SPBU *Shell* ditutup sementara waktu. Kita terpaksa mengganti UGT yang cacat dengan yang baru," ungkap Fathia.

Perlu diketahui, hingga saat ini ada 4 pom bensin *Shell* ditutup. Dua diantaranya berada di Tangerang, yakni di Ciko-kol, Kota Tangerang dan Serpong, Kabupaten Tangerang. Sementara, dua SPBU lainnya, di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan dan di Jalan Raya Cibubur, Jakarta Timur, juga mengalami hal yang sama. CR1

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

PENUNJUKAN LANGSUNG,

TAHUN 2008

NILAINYA RATUSAN MILIAR RUPIAH

# Suami Menteri SBY Dikaitkan Program Pengadaan Smart Card BBM



Mari Elka Pangestu



Siti Fadillah Supari



Sri Mulyani



Meutia Hatta

Program pembatasan konsumsi BBM saja sudah mengundang kontroversi. Kini, tambah lagi, suami dari salah satu menteri SBY yang wanita dikaitkan dengan program pengadaan smart card BBM. Harga IT smart card ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

PROGRAM smart card BBM hingga saat ini memang belum dilaksanakan. Namun, gambar-gambarnya (sosialisasi, red) sudah dilakukan. Berbagai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di jalan protokol di Jakarta sudah diberitahukan tentang kebijakan tersebut.

Smart card terlahir sebagai solusi alternatif dari penolakan masyarakat terhadap rencana kebijakan; pembatasan konsumsi BBM dan menaikkan harga BBM. Dengan smart card, masyarakat pengguna kendaraan mobil dibatasi konsumsinya. Konon, pembatasan akan dilakukan dengan memperhitungkan cc kendaraan.

Namun, meski program smart card ini belum diresmikan, bau tak sedap justru menyeruak ke pihak-pihak yang menangani penyaluran BBM bersubsidi ini, seperti Pertamina. Perusahaan negara ini dituding Komisi VII DPR telah menunjuk pengadaan smart card BBM secara diam-diam, tanpa melalui proses tender terbuka.

Informasi tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie. Kata Alvin, parahnya lagi calon perusahaan yang akan ditunjuk langsung tersebut dikabarkan dipimpin suami dari menteri wanita Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Saat ini ada empat menteri perempuan di kabinet SBY. Ya itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemberdayaan Wanita

Meutia Hatta, dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

"Kami minta pemerintah menjelaskan terlebih dahulu hasil temuan ini, mengingat program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi via smart card belum teruji secara akurat," Alvin Lie usai Rapat Pendapat dengan Menteri ESDM di Gedung DPR/MPR, Jakarta, awal pekan ini.

Ketika didesak untuk menyebutkan nama suami menteri siapa, anggota DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini tidak mau menyebutkannya. "Yang jelas perusahaan itu dipimpin oleh suami dari menteri wanita yang ada di kabinet SBY dan perusahaan itu bergerak pada ekspor dan impor barang," ujarnya

Diketahui, Alvin memang senang membeberkan kasus ke publik. Dahulu, saat kisruh minyak tanah, anak buah Soetrisno Bachir ini memunculkan nama MR sebagai biang keladinya. Dia bilang saat itu, Pertamina dikuasai MR sudah sangat lama.

Lebih lanjut, dengan berbagai informasi yang dimilikinya, koboy DPR ini khawatir program pembatasan BBM dengan smart card akan dijadikan alat kepentingan pengusaha dan elite untuk meraup keuntungan.

Terlebih, kata dia, Pemilu 2009 sudah di depan mata. Buktiya, hingga saat ini Komisi VII DPR belum menerima secara detail bagaimana konsep dan *cost* yang diperlukan dalam merealisasikan program tersebut.

"Tidak tepat jika keterbatasan waktu dijadikan alat untuk mempercepat program tersebut. Karena bagaimana pun, jadi atau tidaknya program ini harus melalui tender terbuka. Apalagi harga dari perangkat IT yang dibutuhkan mencapai Rp 100 miliar. Jadi tidak benar jika program ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung," bebarnya.

Selain itu, Alvin juga mempertanyakan kenapa sampai saat ini pemerintah tidak juga memberikan laporan secara detail ke Komisi terkait atas program tersebut.

"Seharusnya pemerintah sudah menyerahkan semua laporan itu, sehingga kami bisa mengkajinya apakah layak atau tidak program itu diterapkan. Bukan malah jalan sendiri, tanpa melibatkan DPR," keluhnya.

Menurutnya, program pembatasan

bahan bakar minyak subsidi melalui kartu ini sangat mempersulit rakyat untuk mendapatkan kebutuhan BBM. Padahal, kata dia, program tersebut hanya kamufase saja.

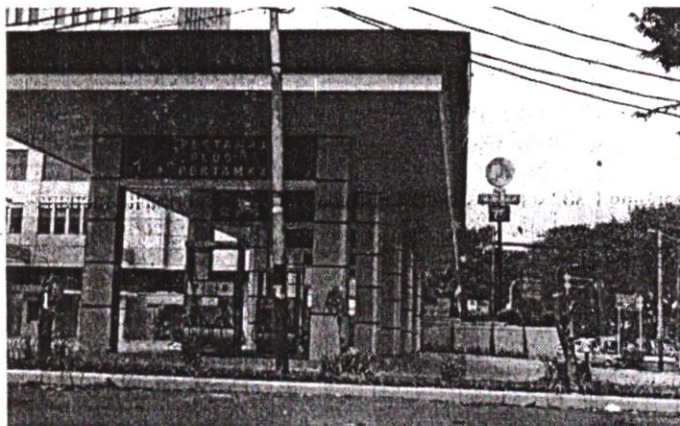
"Ujung-ujung harga BBM naik juga. Hal inilah yang harus diperhatikan pemerintah. Program smart card bisa membuat gejolak sosial di kalangan masyarakat, seiring dengan sulitnya kebutuhan hidup mereka saat ini," tandasnya.

Dari pada memaksakan program yang ujung-ujung menyengsarakan rakyat, politisi PAN meminta pemerintah membenahi terlebih dahulu sistem kinerjanya. Di antaranya evaluasi

ngetahui perkembangan program tersebut alias gelap.

"Kalau pemerintah mau pembatasan BBM, jangan hanya dilakukan survei, tetapi sensus seluruh penduduk dan memperhatikan dampak sosialnya," ujar Suharso kepada *Rakyat Merdeka* di Gedung MPR/DPR Jakarta, awal pekan ini.

Menurut anggota Panitia Anggaran DPR ini, program pembatasan BBM tidak dilakukan secara matang, dan hanya dilakukan dengan cara spontanitas. "Jadi wajar jika timbul kecurigaan dan polemik seputar program tersebut," kata Soharso. Dia berharap, pemerintah mengkaji kembali program itu, apa te-



terhadap sistem harga beli, produksi dan distribusi bahan bakar minyak, apakah sudah efisien atau belum. Alvin menilai, sistem distribusi BBM masih belum efektif.

"Praktik penyelundupan dan penyimpangan BBM masih cukup besar. Hal yang mendasar seperti ini dulu yang harus dibenahi sebagai bentuk pencitraan pemerintah, dari pada melakukan program yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat itu," ujarnya.

#### Komisi VII DPR Gelap

Selain F-PAN, ketidaksetujuan atas program pembatasan bahan bakar minyak melalui smart card juga dikemukakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Anggota Komisi VII DPR Suharso Monoarfa mempertanyakan sejauh mana rancangan program pembatasan BBM bersubsidi bisa memberi keyakinan publik, termasuk ada tidaknya antisipasi jika muncul masalah. Pasalnya, hingga saat ini Komisi VII DPR tidak me-

pat program ini dilakukan saat kondisi rakyat sedang sulit.

Anak buah Menteri Suryadharma Ali di PPP ini juga meminta pemerintah menjelaskan ke publik, sejauh mana perkembangan program ini. Dia khawatir program ini disalahgunakan guna kepentingan kelompok maupun golongan. "Jangan sampai program ini disalahgunakan untuk kepentingan diri dan golongan atau yang lainnya," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar dilakukan pembatasan BBM seiring dengan meroket harga minyak dunia. Program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium dan solar rencananya akan dimulai direalisasikan pada Juni 2008 melalui kartu pintar (smart card) yang ditempel di kaca depan kendaraan.

Dijelaskan, program ini berbeda dengan konsep awal yang hanya meliputi Jabodetabek, kebijakan tersebut langsung diterapkan di seluruh Pulau Jawa. ■ FIK

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
INVESTOR DAILY  
KOMPAS  
KORAN TEMPO  
KORAN KONTAN  
MEDIA INDONESIA  
NERACA  
PIKIRAN RAKYAT  
RAKYAT MERDEKA  
REPUBLICA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

WISNUNTORO, KAHUMAS PT PERTAMINA:

## *Kalau Itu Benar, KPPU Bisa Komplén*

KEPALA Humas PT Pertamina Wisnuntoro tidak mengetahui soal kabar adanya perusahaan yang dipimpin suami dari menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menjadi pemenang tender smart card BBM.

Wisnu menyarankan persoalan tersebut agar ditanyakan langsung kepada BPH Migas sebagai pemegang kendali dalam

pogram tersebut.

"Kalau itu benar maka persoalan ini akan dikomplén oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), maka perlu ada penjelasan dari BPH Migas," ujar Wisnu kepada *Rakyat Merdeka* di Jakarta.

Wisnu mengatakan, sampai saat Pertamina belum mengetahui sejauh mana perkembangan

pendistribusian program pembatasan BBM melalui smart card. Dia bilang, yang menentukan program tersebut adalah BPH Migas. Sementara Pertamina hanya sebatas menyiapkan apa yang dibutuhkan BPH Migas.

"Kami hanya membantu secara teknis saja, bola-nya ada di BPH, bukan di Pertamina," tegas Wisno di Jakarta. ■ FIK

So

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

- KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI  
 UMUM

JAN    **FEB**    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

## Pemerintah Belum Pastikan Penerapan Kartu BBM

[JAKARTA] Pemerintah belum menentukan waktu penerapan sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara tertutup dengan menggunakan kartu kendali untuk minyak tanah dan *smart card* untuk premium dan solar. Sebaliknya, pemerintah melakukan persiapan yang matang dengan melakukan perencanaan yang baik, uji coba, proyek percontohan (*pilot project*) yang baik serta evaluasi atas tahapan-tahapan tersebut.

"Untuk penggunaan *smart card* atau kartu kendali, ada beberapa langkah yang diingatkan Bapak Presiden yaitu harus siap, tidak terburu-buru untuk dilakukan. Yang penting kita siap. Kemudian dilakukan uji coba. Kemudian dilakukan *pilot project*. Kemudian kita lakukan evaluasi dengan benar, apa yang kita lakukan, persiapan kita, uji coba kita, dan *pilot project* kita itu berjalan dengan baik untuk kemudian selalu kita sosialisasikan secara berkelanjutan. Jadi sosialisasi itu penting sekali bagi pelaksanaan program ini. Jadi program ini tidak bu-

ru-buru kita laksanakan, tetapi betul-betul kita persiapkan dulu dengan baik," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Senin (18/2) setelah rapat kabinet terbatas tentang subsidi BBM secara tertutup.

Purnomo menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan agar pemberian subsidi BBM harus tetap sasaran. Subsidi jangan sampai diberikan kepada mereka yang seharusnya tidak mendapat subsidi. Sebaliknya subsidi harus diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan subsidi (*targeted subsidy*).

"Untuk itu dimintai kepada BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas dan Pertamina untuk betul-betul mempersiapkan perencanaan dengan baik, pelaksanaan di lapangan dalam rangka untuk mendapatkan *targeted subsidy*. Selain itu percepatan konversi minyak tanah ke elpiji ini agar dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujarnya. [A-21]

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

## Nelayan Terpukul Penjatahan BBM

Laut adalah "kebun" bagi nelayan seperti sawah bagi petani. Laut Indonesia yang luas tidak saja menjadi kebun yang luas bagi sekitar 16,2 juta nelayan, tetapi juga adalah laut yang subur. Banyak ikannya, tetapi ironisnya, kesuburan laut itu tidak pernah dinikmati oleh nelayan kita. Kalau bukan penangkap ikan dari luar negeri yang datang dengan teknologi yang canggih, laut subur Indonesia itu dinikmati oleh para pengusaha. Seperti nasib banyak petani di negeri ini, nelayan kita juga umumnya telah menjadi nelayan penggarap.

Kalaupun mereka mempunyai usaha penangkapan ikan biasanya modal mereka sangat terbatas. Kini dengan banyaknya kapal asing dengan peralatan penangkapan ikan canggih yang beroperasi dan makin rusaknya lingkungan akibat pencemaran terhadap laut, serta rusaknya terumbu karang, para nelayan kita dengan hampir 600.000 unit kapal harus berlayar lebih jauh dan lama untuk bisa memperoleh ikan. Artinya, makin banyak jatah bahan bakar minyak (BBM) yang harus mereka pergunakan.

Hidup nelayan makin susah. Apalagi saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan, mengalami pukulan sangat berat karena sering dilanda gelombang tinggi serta cuaca buruk. Banyak nelayan yang tidak bisa melaut, sehingga tidak mendapat penghasilan sama sekali. Di beberapa tempat, perahu dan rumah milik nelayan rusak parah diterjang ombak dan angin besar. Banyak nelayan yang hilang saat melaut, sebagian di antaranya ditemukan meninggal dunia.

Mencari ikan di tengah laut adalah pekerjaan yang sangat berat, tetapi pemerintah kurang memberikan perhatian, malah mau menjatah dan menaikkan harga BBM. Kemiskinan bukannya berkurang, tetapi malah akan bertambah banyak. Kebijakan menaikkan BBM pada 2005 saja sudah membuat ba-

nyak nelayan terpukul. Kini datang pukulan baru. Jatah lima liter BBM tentu tidak akan berarti apa-apa bagi nelayan. Mereka tidak bisa berlayar jauh ke tengah laut, di mana masih banyak ikan. Rusaknya terumbu karang dan lingkungan hidup telah membuat nelayan harus berlayar sampai jauh. Itu artinya, mereka membutuhkan BBM lebih dari lima liter. Sudah pasti, mereka harus membelinya dengan harga mahal. Lama-lama makin berkurang jumlah nelayan yang kuat untuk melaut. Padahal, makanan dari sumber daya laut, seperti ikan, adalah makanan sehat, rendah lemak, dan bergizi tinggi yang harus banyak dikonsumsi. Bagaimana kita bisa mengonsumsi makanan laut kalau nelayan tidak melaut? Menunggu hasil tangkapan nelayan dari luar negeri? Tentu harga ikan atau *seafood* pasti akan melonjak tinggi. Laut kita pada akhirnya tidak dapat menyejahterahkan masyarakat. Kalau ini sampai terjadi, sungguh ironi bagi negeri maritim seperti kita.

Oleh karena itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menolak rencana pemerintah menjatah atau membatasi pembelian BBM, termasuk penerapan sistem kartu. Kalau pemerintah tetap ngotot dengan kebijakannya, HNSI meminta agar pemerintah memberikan subsidi kepada nelayan melalui mekanisme yang biasa diterapkan di sektor pertanian, seperti, subsidi benih, pupuk, dan obat-obat pembasmi hama. Nelayan belum pernah mendapat subsidi. Padahal sebagian dari mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Belum dijalankan, sudah terlihat dampak dari kebijakan menjatah BBM, yaitu terjadi penimbunan BBM, seperti, yang berhasil diungkapkan polisi. Lagi-lagi rakyat kecil, seperti, nelayan dan petani yang menanggung derita akibat kebijakan penjatahan BBM. Sungguh ironi kalau nelayan kita tidak bisa melaut dan kita pun tidak bisa makan ikan.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    **FEB**    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 **(20)** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

### Pertamina orders two more vessels

JAKARTA: State oil and gas firm PT Pertamina has ordered the construction of two vessels from state ship builder PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) for US\$29.2 million.

"The order of these two vessels is an effort to rejuvenate and expand our network," Pertamina president director Ari H. Sumarno said after the signing of the agreement with PDS on Tuesday.

Pertamina currently owns 26 ships and leases 104 others.

M. Firmansyah Arifin, director of DPS, said the two vessels were the fifth and the sixth Pertamina had ordered from DPS.

The two 6,500 Long Ton Dead Weight (LTDW) vessels, which will be delivered in 2011, will be used to distribute fuel throughout the country. (JP/rff)

53.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

- KODE :  LISTRIK                       MINERAL, BATU BARA                       GEOLOGI  
 MIGAS                                      DAN PANAS BUMI                                       UMUM  
 ENERGI ALTERNATIF

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18 TAHUN 2008

# Oil prices rise above \$96 a barrel

**Associated Press**  
*Bangkok*

Oil prices rose Tuesday in Asia as investors eyed the possibility that OPEC may cut production just ahead of the second quarter, when gasoline demand in the Northern Hemisphere usually becomes the central focus of the market.

An explosion at a 70,000-barrel-a-day refinery in Texas may have also boosted prices, but the primary worry is that the Organization of Petroleum Exporting Countries may cut supplies next month to support prices in a US\$85-\$100 a barrel range, said Tetsu Emori, commodity markets fund manager at ASTMAX Futures Co. in Tokyo.

OPEC may do so just ahead of the second quarter when oil

prices have started an annual run-up the past five years as people looked ahead to "gasoline demand coming in the spring," Emori said.

The explosion Monday at the Alon USA refinery at Big Spring, Texas, injured four workers, with one employee hospitalized for burns.

All workers were accounted for about an hour after the explosion, according to Blake Lewis, a spokesman for Alon.

A fifth person was injured when her car was struck by debris on a nearby major highway, Big Spring Mayor Russ McEwen told the Odessa American newspaper. She was treated and released from a hospital.

Fires that lingered after the blast were extinguished late Monday afternoon (Tuesday morning in Asia), Lewis said.

The next step will entail getting into the site to determine what happened and how to make repairs.

Alon USA Vice President David Foster said he expected the refinery to be offline for weeks.

Light, sweet crude for March delivery rose 83 cents from Friday's floor close to \$96.33 a barrel in Asian electronic trading on the New York Mercantile Exchange by midday in Singapore.

The price is now about \$9 a barrel more than the closing price in the U.S. on Feb. 6.

In London on Tuesday, Brent crude for April delivery rose 34 cents to \$95.25 a barrel on the ICE Futures exchange.

Trading volumes have been thin so far this week due to the President's Day holiday in the United States — where

the floor session was closed Monday — and the start in London of International Petroleum Week, a reputed oil industry conference.

The U.S. Energy Department, the International Energy Agency and OPEC have all cut demand forecasts for this year.

Also, a seasonal slump occurs in the first quarter of every year, and "people are worrying about a U.S. recession ... giving some effect to oil demand in the U.S.," said Emori.

OPEC wants "take it as a more supportive factor to make further production cuts, even though the price is going higher," he said.

"They don't care about the supply-demand balance, what they want to do is hold the price level."

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    **FEB**    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

**KRIMINALITAS**

## 71 Pengoplos Solar Ditangkap

**JAKARTA (MI):** Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 71 pengoplos solar dalam operasi yang digelar sejak November 2007 hingga Februari 2008.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro AKB Tony Hermanto mengatakan dalam operasi itu pihaknya menyita 242 ton BBM terdiri dari 114 ton solar, 120 ton minyak tanah, dan 8 ton minyak hitam atau residu. Selain itu, petugas mengamankan 27 kendaraan, di antaranya truk

tangki, *dump truck*, dan pikap.

Adapun tersangka yang ditangkap berprofesi sebagai sopir truk pengangkut solar ilegal hingga pemilik lokasi oplosan. Mereka ditangkap dari sejumlah ruas jalan di Bekasi, Tangerang, dan Tol Cikampek. "Truk pengangkut solar oplosan kami hentikan di tengah jalan. Setelah kami periksa, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar Tony di Jakarta, kemarin.

Mantan Kapolres Kabupaten Bekasi itu menjelaskan modus

kejahatan yang dilakukan komplotan ini adalah mengoplos solar dengan minyak tanah. Minyak solar oplosan itu kemudian dijual ke industri dengan harga resmi. Sementara itu, pelaku mendapatkan solar dari pangkalan liar yang mencuri dari jalur distribusi. "Ada juga yang membeli dari sejumlah SPBU. Kami sedang selidiki SPBU yang menjual solar tersebut," tandasnya.

Kasat Sumber Daya Lingkungan AKB Bahagia Dachi menambahkan, solar oplosan dibawa dari Bekasi dan Bandung. Solar itu didistribusikan ke sejumlah pabrik di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "Solar oplosan itu tidak dibawa menggunakan truk tangki untuk mengelabui petugas."

Salah seorang tersangka berinisial ED mengaku baru lima bulan melakukan aksinya. Dalam seminggu, ia mampu menjual hingga 20 drum atau setara dengan 400 liter. "Keuntungan saya Rp200 ribu-Rp400 ribu. Setiap mengantar ke pabrik, bisa ratusan liter," ujarnya. **(Ars/J-3)**

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

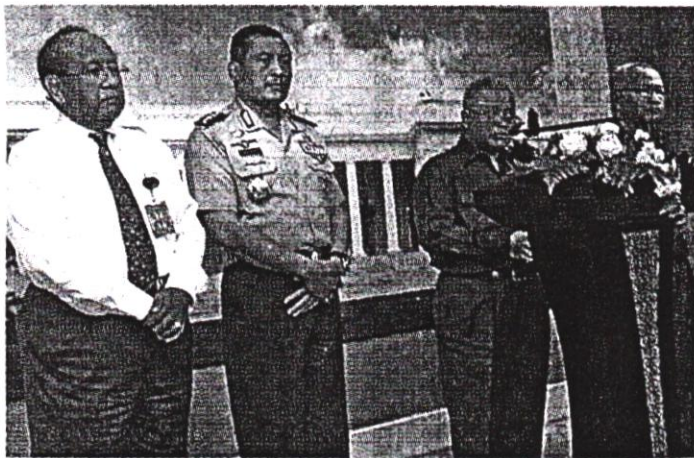
MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008



■ ANTARA/RUMGAPRES/HARYANTO

**BLOK D ALFA:** Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro didampingi Dirut Pertamina Arie H Sumarno (kiri), Kapolri Jenderal Sutanto (kedua kiri), dan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Tubagus Haryono (kanan) memberikan keterangan sesuai rapat terbatas kabinet mengenai negosiasi Blok D Alfa Natuna di daerah Kepri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

**MIGAS**

## Pemerintah Putus Kontrak Exxon di Natuna

**JAKARTA (MI):** Pemerintah akhirnya memutuskan kontrak Exxon Mobil di lapangan Blok D Alfa Natuna dan menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Langkah itu diambil setelah negosiasi antara pemerintah dan Exxon mengalami jalan buntu.

Exxon Mobil hingga batas waktu negosiasi berakhir belum mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Khususnya soal perpajakan, periode kontrak, jaminan pemerintah, depresiasi, dan *split* (bagi hasil).

Sikap pemerintah itu diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono, di Jakarta, kemarin. Hadir dalam rapat itu Wapres Jusuf Kalla, tiga menko, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dan Dirut PT Pertamina Ari Soemarsono.

Purnomo sesuai rapat mengatakan topik yang dibahas adalah negosiasi D Alfa Natuna. Karena, negosiasi telah berjalan hampir satu tahun, namun masih ada isu yang sangat sulit sekali untuk dipertemukan antara pemerintah dan Exxon. Di

antaranya, pajak, periode kontrak, jaminan pemerintah, depresiasi, dan *split*. Pemerintah ingin mengenakan peraturan pajak baru, tapi Exxon ingin pajak yang lama.

"Jadi, setelah mempertimbangkan bahwa Exxon sudah cukup diberi waktu untuk negosiasi, Presiden meminta Pertamina bersiap diri mengelola gas D Alfa Natuna," kata Purnomo.

Purnomo mengatakan, jika pengelolaan gas D Alfa Natuna dimulai, akan menjadi investasi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Karena, akan menelan setidaknya US\$30 miliar.

Presiden, ungkap Purnomo, meminta PT Pertamina dalam tempo empat minggu mempersiapkan secara rinci. Misalnya, studi visibilitas, teknologi, keekonomiannya, dan minta dilaporkan kepada presiden pada kesempatan pertama.

Di tempat yang sama, Dirut PT Pertamina Ari Soemarsono menyatakan sanggup mengelola lapangan Natuna. Pertamina mencari partner yang memiliki empat kemampuan, yaitu penguasaan teknologi penghapusan CO<sub>2</sub>, teknologi penyimpanan CO<sub>2</sub> kembali, dan teknologi lepas pantai. (Faw/Pia/E-2)